

NEWSLETTER

LP3Y Ford Foundation

BERMEDIA, melahirkan atau mewujudkan media sebagai sarana komunikasi dan pemenuhan hak warga untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi, tak cukup hanya berbekal kemauan maupun dana.

Untuk bermedia dibutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan juga visi serta tujuan. Tanpa memiliki visi dan tujuan, kerja bermedia bisa terjerumus menjadi kerja pertukangan. Kerja pertukangan sudah bisa dilakukan jika seseorang memiliki keterampilan.

Program Warga Bermedia yang dilakukan LP3Y bersama warga lima desa di Bantul (warga Desa Jambidan, Wonolelo, Srihardono, Mulyodadi dan Gilangharjo) dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ada dua bentuk media yang akan dihasilkan kelak melalui pendampingan program ini, yaitu radio komunitas dan koran warga.

Selama lima bulan, Juni hingga Oktober, warga lima desa yang akan mengelola kedua media tersebut didampingi LP3Y menjalankan serangkaian kegiatan terkait proses penyiapan pembentukan kedua media. Khusus untuk radio komunitas, dua di antaranya secara teknis sudah beroperasi.

Di bulan Juni, para pengelola sekaligus calon reporter koran warga sudah melakukan dua kali pertemuan pelatihan jurnalistik dari rencana 10 kali pertemuan pelatihan. Penting dicatat bahwa materi pelatihan yang diberikan merupakan kebutuhan sebagaimana dirumuskan warga dalam workshop di bulan Mei.

Kelak, warga dari lima desa ini akan bekerja dalam satu tim untuk menerbitkan koran warga dengan periode bulanan selama kurang lebih satu setengah tahun. Koran ini nantinya

menjadi salah satu media bagi warga di lima desa untuk berbagi informasi, sebab selain distribusinya untuk lima desa, informasinya pun mengenai komunitas di ke lima desa. Di harapkan, setelah itu warga bisa melanjutkan proses penerbitannya sendiri secara swadaya.

Pengelola radio komunitas juga telah memulai kegiatan bersama di bulan Juni. Untuk program radio komunitas



Peserta Pelatihan Koran Warga ketika berlatih di LP3Y

memang ada penyesuaian agenda atas hasil workshop 19-20 Mei. Jika RTL (Rencana Tindak Lanjut) hasil workshop merencanakan pelatihan jurnalistik dan teknis, pada perkembangannya, di bulan Juni ini pengelola dan calon pengelola lima radio komunitas memulai kembali merumuskan langkah penyiapan. Sebab ternyata, persoalan menyangkut administratif dan legalitas belum tersentuh. Padahal ini merupakan prasyarat bagi pendirian media

penyiaran, radio komunitas sekalipun.

Dua kegiatan bersama warga lima desa di Bantul tersebut menjadi sajian dalam Newsletter LP3Y edisi kali ini. Tak hanya itu. Wahyudin atau yang akrab disapa Judin, pengelola Radio Sadewa (radio komunitas di Wonolelo, Pleret), kami pilih menjadi sosok untuk rubrik profil.

Program Warga Bermedia di lima desa di Bantul yang didukung Ford Foundation ini tak berdiri sendiri. Ini terkait juga dengan program pengembangan ekonomi yang dilakukan Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) dan peningkatan partisipasi publik yang didampingi Institute for Development and Economic Analisis (IDEA). Untuk itu, di newsletter ini dihadirkan pula laporan mengenai kegiatan mitra LP3Y tersebut.

Selamat membaca, semoga bermanfaat. (ded)



Cara mendapatkan NEWSLETTER LP3Y: Kirimkan identitas serta nama media Anda, akan kami kirimkan secara gratis. Informasi yang kami muat di NEWSLETTER dapat dikutip atau disiarkan tanpa ijin asal menyebutkan sumber. Apabila anda memiliki informasi tentang HIV/AIDS yang layak untuk disebarkan kepada masyarakat luas, silakan kirim dan akan kami muat. Anda dapat menghubungi kami ke alamat: LP3Y Jl. Kaliurang Km 13,7 Ngemplak, Sleman, Yogyakarta 55584 atau via telepon dan faksimili No. (0274)896016, email: lp3y@idola.net.id dan situs <http://www.lp3y.org>

Penanggung Jawab : Ashadi Siregar Pimpro/Pemimpin Redaksi : Slamet Riyadi Sabrawi Staf Redaksi : Ismay Prihastuti, Masduki, Rondang Pasaribu, Agoes Widhartono, Dedi H Purwadi Sekretaris Redaksi : W. Nurcahyo



PERTEMUAN LANJUTAN PASCA WORKSHOP BANTUL

SEBAGAI tindak lanjut setelah *workshop* dua hari di Bantul, 19-20 Mei lalu, maka pada Kamis 3 Juni 2010, bertempat di aula LP3Y, Jalan Kaliurang Km 13,7, diadakan pertemuan para pengelola radio komunitas (Rakom) dari lima desa, yakni Jambidan, Srihardono, Gilangharjo, Mulyodadi dan Wonolelo, Kabupaten Bantul.

Dalam program Warga Bermedia ini, diketahui bahwa dari lima desa tersebut dua di antaranya sudah memiliki Rakom, yakni Wonolelo dan Jambidan. Tiga desa lain, Mulyodadi, Srihardono dan Gilangharjo, belum bermedia Rakom.

Pertemuan ini tentu saja tidak sekadar sebagai lanjutan *workshop*, tetapi lebih pada bagaimana memantapkan langkah menuju terwujudnya radio komunitas bagi warga desa setempat. Artinya, bagaimana media tersebut kelak bisa benar-benar berdiri, kokoh, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan warga dan tentu saja harus sudah dilandasi dengan perizinan. Dengan demikian, warga dan atau pengelola Rakom tidak saja memiliki pengetahuan, memahami seluk beluk teknis maupun non teknis, etika dan kaidah penyiaran radio komunitas, namun juga mengerti benar bahwa untuk menuju ke sana mesti melalui langkah mendapatkan izin dari pemerintah.

Untuk keperluan itulah, pada pertemuan di LP3Y yang diikuti 16 orang tersebut, dihadirkan dua orang narasumber, yakni Direktur LP3Y, Ashadi Siregar dan Ketua Komisi Penyiaran Daerah (KPID) DIY Rahmat Arifin.

Keduanya menjelaskan secara lengkap, detil, bagaimana langkah yang harus ditempuh jika hendak mendirikan stasiun penyiaran radio komunitas.

Dalam makalahnya berjudul *Lembaga Penyiaran Komunitas Proses Perizinan*, Ashadi Siregar menjelaskan

secara teknis maupun non teknis kepada para peserta, termasuk di dalamnya bagaimana sebuah rakom harus dibangun dengan kebersamaan namun juga harus memenuhi azas legalitas.

Sedangkan Rahmat Arifin menjelaskan bagaimana prosedur yang harus ditempuh jika kelak warga desa mengajukan izin siaran ke KPID. “Saya siap membantu. Saya salut dengan LP3Y, yang berprinsip bahwa radio komunitas yang dibina di lima desa ini harus memenuhi izin terlebih dulu. Sebab, seperti diketahui, di DIY ini ada puluhan radio komunitas, namun hanya sedikit yang

sudah mengantongi izin,” ujarnya.

Sesi kedua narasumber itu berlangsung hingga pukul 12.45 WIB. Setelah istirahat siang, acara dilanjutkan dengan topik pemetaan masalah, mulai pukul 13.30 hingga 15.30 WIB.

Pemetaan masalah

Dalam sesi ini dibedah beberapa masalah yang terjadi di desa yang belum memiliki Rakom maupun desa yang sudah memiliki Rakom.

Desa Jambidan dengan Rakom Swadesi, misalnya, berjanji akan segera menyelesaikan perizinan. Hendro Plered, salah satu pengelola Rakom Swadesi mengatakan, persyaratan sudah dipenuhi, hanya tinggal mengajukan ke KPID. Untuk standarisasi peralatan, juga harus ditempuh oleh Rakom Swadesi.

Senada dengan Jambidan, persoalan tersebut juga dialami oleh Rakom Sadewo dari Desa Wonolelo. Artinya, persoalan pokoknya adalah bagaimana mewujudkan perizinan, mulai dari proposal perizinan, hingga standarisasi alat. Persoalan lain yang sering dikatakan sebagai persoalan “klasik”, adalah biaya operasional.



Rondang Pasaribu saat memberikan materi pada peserta Pelatihan Koran Warga



Dapur Info

Akan halnya tiga desa lain, Mulyodadi, Gilangharjo dan Srihardono, memiliki persoalan yang sama tapi sedikit beda. Tak jauh dari Mulyodadi, memang sudah ada Rakom Patas, di Desa Sidomulyo, yang sudah diproses oleh KPID. Desa Mulyodadi belum berkeputusan, apakah akan menggabungkan diri dengan Rakom Patas atau mendirikan Rakom sendiri.

Desa Gilangharjo meneruskan proses pendirian Rakom yang sudah pernah dilaksanakan, tinggal menelusuri kembali dokumen yang pernah dibuat beberapa waktu lalu. Sedangkan Desa Srihardono berkeputusan untuk mendirikan Rakom sendiri.

Agenda pertemuan pengelola Rakom dalam program ini, selanjutnya disepakati akan dilaksanakan pada Minggu 20 April 2010, mulai pukul 09.00 WIB, bertempat di Radio Swadesi, Desa Jambidan.

Sendiri

Sejak *workshop* di Bantul minggu ketiga April hingga pertemuan Kamis 3 Juni di LP3Y, Desa Mulyodadi memang

belum menentukan sikap dalam hal radio komunitas ini. Baru pada pertemuan yang dilaksanakan pada Selasa 8 Juni 2010 di Balai Desa Mulyodadi, disepakati bahwa desa tersebut akan mendirikan Rakom.

Kesepakatan itu didapat berdasarkan mufakat sebagian warga desa yang hadir dalam rapat sore itu, di Balai Desa Mulyodadi, berjumlah sekitar 30 orang. Hadir antara lain perangkat desa, Kabag kemakmuran dan Kesra serta tokoh masyarakat, pemuda dan Karang Taruna. Pertemuan berlangsung mulai pukul 13.30 hingga 16.00 WIB.

Menurut Subarno, pegiat Rakom Desa Mulyodadi, setelah warga bersepakat hendak mendirikan Rakom, maka proses selanjutnya akan benar-benar dipatuhi, mulai dari pengumpulan tandatangan dukungan warga dan syarat-syarat administrasi lainnya, termasuk di dalamnya membentuk kepengurusan yang disahkan secara hukum. Pertemuan intensif warga desa akan terus diadakan guna mewujudkan radio komunitas bagi warga Desa Mulyodadi tersebut.* (awd)

PELATIHAN JURNALISTIK DASAR KORAN WARGA

Pertemuan kelompok Koran Warga ini merupakan pertama kalinya pasca *Workshop* di Bantul pada bulan lalu. Pertemuan yang berlangsung pada Sabtu, 5 Juni 2010 ini bertempat di LP3Y dengan dihadiri hanya 9 (sembilan) peserta: tiga orang dari Srihardono, Pundong; satu orang dari Jambidan, Banguntapan; dua orang dari Wonolelo, Pleret; dua orang dari Gilangharjo, Pandak; satu orang dari Mulyodadi, Bambanglipuro.

Jumlah peserta kegiatan seluruhnya 15 orang, sebanyak lima orang tidak hadir karena ada keperluan keluarga dan satu orang mengundurkan diri (akan dicarikan pengganti untuk kelanjutan kegiatan)

Selama kegiatan pelatihan peserta didampingi dua fasilitator yakni Dedi Purwadi dan Rondang Pasaribu, yang juga menjadi pemberi materi tentang jurnalistik. Adapun materi yang diberikan pada pertemuan yang berlangsung dari pukul 10.00-16.00 meliputi:

1. **Pengenalan komputer** (sesuai *assesment* pada *workshop* 19-20 Mei) untuk beberapa peserta. Namun ternyata, dari 9 peserta hanya dua orang yang belum mahir.
2. **Penyusunan teks.** Kegiatan ini berupa aktivitas menyusun potongan-potongan teks berita menjadi teks utuh yang runtut sesuai pemahaman para peserta. Ini dimaksudkan agar peserta langsung menghadapi dan mengalami proses penyusunan teks dan belajar langsung mengenai sistematika dalam menyusun teks.

3. **Pengenalan jurnalistik.** Kepada peserta sebagai calon reporter sekaligus pengelola koran warga dikenalkan pengetahuan dasar jurnalistik. Pengetahuan dasar ini mengenai apa dan tujuan kerja jurnalistik, alat kerja jurnalistik dan prinsip-prinsip kerja jurnalistik.
4. **Pengenalan anatomi dan unsur berita.** Melalui diskusi kelompok peserta mengenali berita dan menganalisis secara sederhana sebuah berita dari surat kabar Yogya, kemudian mengidentifikasi unsur-unsur berita (5W+H) pada berita tersebut.
5. **Pengenalan Bahasa Jurnalistik.** Sesi ini untuk mengenalkan pengetahuan awal bahasa jurnalistik mengenai judul, kata, kalimat, alinea. Topik-topik ini akan disampaikan lebih dalam disertai praktik latihan pada pertemuan pelatihan selanjutnya.
6. **Menulis peristiwa hari ini.** Sesi ini terpaksa tidak bisa dilaksanakan karena pertimbangan waktu. Kegiatan yang seharusnya dimulai pukul 09.00 baru dimulai pukul 10.00 karena separoh peserta belum datang ke tempat pelatihan. Sesi ini dijadwalkan diterapkan pada pertemuan berikut.

Hasil yang dicapai pada pertemuan yang pertama ini terlihat peserta tidak mengalami kesulitan dalam menyusun teks dan peserta relatif cepat dalam mengidentifikasi dan merumuskan unsur berita.***



KEKERASAN TERHADAP ANAK: BERITA DAN GERAKAN PERLAWANAN BERSAMA

KETUA Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, menyatakan bahwa gerakan melawan kekerasan terhadap anak seharusnya mendapat respons dari seluruh kalangan, termasuk dari pemerintah dan polisi (*Kompas*, 24/6/2010).

Pernyataan tersebut menarik disimak. Di dalam pernyataan itu tersirat ajakan bahwa kekerasan terhadap anak sudah seharusnya dilawan melalui gerakan bersama.

Jika upaya melawan kekerasan terhadap anak menjadi gerakan bersama, apa kira-kira peran yang tepat yang seyogyanya bisa dilakukan oleh media massa dalam gerakan bersama itu?

Mencemaskan

Tak dapat dipungkiri, berbagai peristiwa kekerasan terhadap anak diketahui masyarakat luas berkat pemberitaan media massa.

Sederetan peristiwa kekerasan terhadap anak sebagaimana dicontohkan berikut, berkali-kali menjadi berita. Ada diberitakan anak menjadi korban penculikan (dalam kasus penculikan demi uang tebusan atau perdagangan anak), atau anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (anak disiksa atau dibunuh orangtua), atau anak menjadi korban eksploitasi ekonomi. Saat lain diberitakan anak menjadi korban kekerasan seksual (sodomi, perkosaan, atau pelecehan seksual), yang bahkan berujung dengan kematian korban.

Salah satu pesan yang segera tertangkap setelah membaca berita seperti itu adalah sebagai berikut: Anak, tidak soal apakah anak hidup bersama keluarga secara normal atau hidup sebagai anak jalanan, selalu terancam tindak kejahatan.

Kecemasan itu beralasan. Berdasarkan pengamatan atas berita peristiwa kekerasan terhadap anak, terungkap bahwa pelaku kebanyakan adalah orang yang dikenal baik oleh anak yang menjadi korban. Karena sudah kenal, ditambah dengan sikap polos anak yang tidak menaruh curiga, serta sikap anak yang cenderung mudah terpikat oleh pemberian, semua itu dimanfaatkan pelaku melaksanakan niat jahatnya. Dan celakanya, sikap anak yang takut ancaman menyebabkan kasus kekerasan yang dialami tidak segera diketahui orang lain.

Tidak Semua Terungkap

Kecemasan akan semakin berkepanjangan, manakala pelaku belum tertangkap. Karena selama pelaku masih bebas

berkeliruan, ada kemungkinan akan ada anak lain yang menjadi korban. Contoh berikut menjelaskan hal itu.

Bulan Januari lalu, diberitakan sudah hampir empat bulan penculikan bayi bernama Aulia Turrohman, 11 bulan, di Depok, belum juga terungkap (*Koran Tempo*, 15/1/10). Pasalnya, polisi tidak memperoleh informasi yang cukup tentang penculik. Ibu korban maupun anggota keluarga korban tidak satu pun yang pernah melihat penculik. Jenis sepeda motor yang dipakai pelaku saat melarikan bayi itu juga tidak jelas. Polisi mengaku sudah menelusuri hingga ke wilayah Bekasi dan Kramat Jati, hasilnya nihil.

Sampai kapan polisi akhirnya berhasil menangkap penculik, tidak bisa diketahui. Namun ada hal yang bisa diketahui, yaitu selama penculik belum ditangkap dan dihukum, selama itu pula kecemasan akan menghantui, terutama bagi orangtua yang mempunyai anak balita.

Akan tetapi, kasus penculikan anak yang belum terungkap seperti dicontohkan tersebut hanyalah salah satu sumber kecemasan. Sebagaimana disebutkan di atas, tindak kekerasan terhadap anak bukan semata penculikan. Dan yang tak kalah mencemaskan, tindak kekerasan berlangsung selama bertahun-tahun sebelum pelaku ditangkap polisi. Berikut ini contohnya.

Awal Juni ini, diberitakan bahwa RZ, seorang bocah berusia 15 tahun, pelaku sodomi, ditahan polisi di Magelang (*Koran Tempo*, 03-06-2010). Menurut keterangan Kepolisian Resor Magelang, ada delapan anak korban sodomi RZ sejak 2006, enam lelaki dan dua perempuan, berusia antara 5-15 tahun.

Tidak ada keterangan kapan dan dari pihak mana polisi mengetahui kasus tersebut, sampai akhirnya menahan RZ sebagai pelaku sodomi. Maka, muncul pertanyaan berikut: Mengapa RZ baru ditahan awal Juni 2010, sedang dalam berita disebutkan bahwa perbuatan sodomi dilakukan sejak 2006?

Ada dua kemungkinan yang bisa menjawab pertanyaan tersebut.

Pertama, polisi sebenarnya sudah lama mengetahui ada anak korban sodomi, namun belum berhasil memperoleh bukti atau petunjuk kuat siapa pelaku sodomi. Belakangan, polisi memperoleh bukti atau petunjuk kuat, dan berdasarkan itu menahan RZ.

Kedua, selama empat tahun perbuatan sodomi itu tidak pernah diketahui orang lain. Semua korban menutup mulut



Analisis Info

rapat-rapat. Tapi akhirnya ada anak yang mengungkapkan bahwa dirinya menjadi korban perbuatan sodomi RZ, yang disampaikan kepada seseorang – orangtua atau keluarga – dan orang inilah yang kemudian melaporkan RZ ke polisi. Berdasarkan laporan itu, RZ ditahan.

Terlepas dari kemungkinan mana yang terjadi, harus digarisbawahi adalah selama empat tahun, RZ melakukan perbuatan sodomi tanpa ketahuan.

Contoh berikut juga menunjukkan tindak kekerasan terhadap anak berlangsung jauh lebih lama, yang diketahui melalui terungkapnya kasus sodomi dan sekaligus mutilasi oleh Baekuni (Babe). Pria berusia 49 tahun ini ditangkap polisi Jumat (08-01-2010), mengaku kejahatannya telah dilakukan sejak tahun 1998. Pria. Korbannya diduga lebih dari 15 anak. Jadi, selama 12 tahun Babe melakukan kejahatan tanpa ketahuan. (lihat berita tentang kasus ini yang dimuat *Koran Tempo*, antara tanggal 10 – 20 Januari 2010).

Meningkatkan Peran

Selama ini, peristiwa kejahatan terhadap anak, apakah penculikan atau bentuk kekerasan lain seperti sodomi, penyiksaan, dan sebagainya, menjadi berita begitu peristiwa dilaporkan sedang pelaku belum diketahui, atau manakala kasus demi kasus berhasil diungkap polisi dan pelaku ditahan.

Selain itu, ada juga berita tentang peningkatan peristiwa kekerasan terhadap anak, dengan menyebutkan kasus tahun ini sekian, meningkat sekian persen dibanding tahun lalu. Berita yang disebut belakangan ini biasanya ditulis berdasarkan laporan tahunan lembaga tertentu, semisal Komisi Nasional Perlindungan Anak.

Akan tetapi, sebagaimana dikemukakan di atas, kiranya tidak lagi cukup apabila media massa hanya memberitakan dengan cara seperti itu. Sebab, memberitakan peristiwa kekerasan sebatas cara itu jelas hanya menyebarkan kecemasan. Orangtua menjadi paranoid, sebab tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Bukankah dalam berita peristiwa kekerasan terhadap anak diungkap bahwa kebanyakan pelaku adalah seseorang yang dikenal baik oleh anak yang menjadi korban?

Merujuk ajakan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak seperti dikutip di atas, media massa perlu ikut berperanserta dalam menumbuhkan kepedulian setiap kalangan agar terlibat dalam upaya melawan kekerasan terhadap anak, sehingga upaya itu menjadi gerakan perlawanan bersama.

Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah memuat laporan terencana dan jika perlu dimuat secara berkala, yang menggambarkan dari sekian peristiwa kejahatan terhadap anak, berapa yang sudah terungkap dan berapa yang belum.

Berapa yang sudah terungkap dan berapa yang belum, menjadi penting. Laporan dimaksud tidak hanya mengingatkan polisi agar terus berupaya sampai akhirnya berhasil menangkap pelaku kejahatan. Dengan mengungkap berapa banyak kasus belum terbongkar, laporan sekaligus mengingatkan masyarakat agar waspada. Tidak saja waspada dalam arti berupaya melindungi anak sendiri agar tidak menjadi korban, tetapi juga ikut peduli supaya anak keluarga lain tidak menjadi korban.

Ambil contoh kasus penculikan anak. Barangkali tidak sedikit kasus penculikan belum menemukan titik terang. Berapa

persis jumlah kasus penculikan anak yang belum terpecahkan, hanya bisa diketahui dengan membuka arsip kepolisian. Sebab, kenyataannya, jarang diberitakan jumlah kasus penculikan anak yang belum terpecahkan. Itu bisa terjadi karena polisi memang tidak mengeluarkan siaran pers mengenai jumlah kasus penculikan anak yang belum terpecahkan itu. Karena lama tidak belum terbongkar, jurnalis akhirnya ikut lupa atas kasus-kasus tersebut.

Bukan mustahil keadaan serupa juga berlaku untuk jenis lain peristiwa kekerasan terhadap anak. Artinya, tindak kekerasan telah terjadi, anak telah menjadi korban, namun pelaku belum diketahui atau setelah lama barulah pelaku berhasil ditangkap. Perbuatan yang dilakukan RZ

maupun Babe sebagaimana dicontohkan, menggambarkan hal itu. Selama bertahun-tahun kedua pelaku melaksanakan tindak kejahatan tanpa ketahuan.

Selain itu, media massa juga perlu membuat laporan-laporan yang mengkritisi sejauh mana UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. UU ini seharusnya tidak hanya baik tertulis di atas kertas, tidak pula hanya diterapkan untuk menghukum pelaku ketika anak telah menjadi korban kekerasan. Akan ideal apabila penerapan UU tersebut lebih fungsional sebagai acuan bersama yang menggerakkan berbagai kalangan untuk menjalankan langkah pencegahan tindak kekerasan terhadap anak.

Dengan kata lain, media massa juga perlu meningkatkan kesadaran bahwa anak, apakah anak hidup dalam keluarga normal atau hidup sebagai anak jalanan, sesungguhnya berada dalam posisi rentan. Karena itu, kepedulian terhadap anak dan kewaspadaan atas bahaya yang senantiasa mengancam anak, perlu dikembangkan menjadi wacana oleh media massa, sehingga kepedulian dan kewaspadaan itu menjadi milik bersama.

Dengan laporan semacam itu antara lain, media massa bisa dikatakan ikut menggalang gerakan bersama melawan tindak kekerasan terhadap anak. (*rondang pasaribu*)

“
**Tak dapat dipungkiri,
berbagai peristiwa
kekerasan terhadap
anak diketahui
masyarakat luas
berkat pemberitaan
media massa.**
”



ELPIJI DAN NASIB MASYARAKAT INDONESIA

PROGRAM konversi minyak tanah ke gas elpiji sebagai bahan bakar pada tahun 2007 lalu, ternyata banyak menimbulkan masalah. Persoalan yang menghangat belakangan ini sejumlah kasus tabung gas 3 kilogram yang dibagikan gratis oleh pemerintah meledak dan membahayakan masyarakat. Mengapa itu sampai terjadi?

Konversi minyak tanah ke gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau elpiji sepertinya memang terkesan tergesa-gesa. Program yang melibatkan kementerian Sumber Daya Manusia, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan UKM, dan PT. Pertamina tampaknya sangat buruk dari sisi implementasi kebijakan yang ada.

Hal ini terlihat, pemerintah terkesan menyepelekan masalah sosialisasi, seolah-olah jika sudah mengumumkan ke media massa semua unsur masyarakat akan mengerti dan selanjutnya akan mendukung program konversi tersebut. Padahal mengubah kebiasaan perilaku masyarakat tidak mudah. Namun hal ini tampaknya tidak menjadi perhatian serius pemerintah.

Salah satu faktor, yakni minimnya sosialisasi terhadap persoalan inilah yang menyebabkan banyaknya kasus ledakan elpiji. Tidak semua orang, anggota masyarakat sadar seperti apa bau gas yang menyengat. Masyarakat tidak diberitahu apa yang harus dilakukan jika timbul bau dari tabung atau selang gas yang bocor. Pemerintah hanya mengeluarkan iklan layanan dengan hanya menunjukkan unsur kehematan jika menggunakan elpiji 3 kilogram tersebut.

Jatuh Korban

Setelah hampir tiga tahun program berjalan, dalam kurun waktu itulah tercatat kasus ledakan elpiji menyeruak. Beberapa kasus yang terdeteksi setelah konversi tersebut tercatat sekitar 88 kasus akibat kecelakaan elpiji. Hal itu disebabkan karena produk yang diterima produsen tidak standar. Hasil survei Badan Standar Nasional (BSN) menunjukkan sekitar 66 persen atau 29 juta tabung dari paket perdana elpiji 3 kilogram sebanyak 44 juta paket tidak layak pakai. Begitu juga dengan komponen lain, yakni sekitar 50 persen atau sebesar 22 juta unit kompor dan 100 persen selang tidak layak pakai, serta sekitar 8,8 juta regulator tidak memenuhi standar. (<http://pywp-indonesia.or.id/>).

Meskipun data yang diperoleh BSN demikian, namun pemerintah dapat dikatakan sangat lamban merespon persoalan

ini. Hal ini terlihat dari sikap-sikap para pihak yang dipercaya menangani program ini melalui pernyataannya, saling lempar tanggungjawab dan tidak berusaha mencari solusi. Beberapa pernyataan berikut menjadi gambaran sikap mereka.

Misalnya, anggota Komisi Pertambangan dan Energi DPR M Romahurmuzy yang mengatakan, setidaknya 60 kasus ledakan tabung elpiji telah terjadi sejak dimulainya program konversi minyak tanah ke elpiji pada 2008. Dan menurutnya Pertamina sebagai pihak yang bertanggung jawab seharusnya *fair* dengan mengumumkan korban-korbannya. “Ini agar kasus yang sama tidak terulang,” katanya.

Akan tetapi pemerintah menolak disalahkan dalam kasus ledakan tabung gas ini. Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Indroyono mengaku pengawasan sudah dilakukan secara ketat, mulai dari tabung, selang, regulator, bahkan hingga segel karet (*rubber seal*) yang diproduksi PT. Pertamina.

“Dari pengkajian awal, tabung tidak bermasalah. Tidak ada kecelakaan terjadi karena tabungnya bocor. Kalau tabung sampai ada yang bocor pasti sudah terpantau karena inspeksinya ketat,” kata Indroyono.

Lain halnya dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedi Saleh. Dia malah menuding kurangnya sosialisasi sebagai penyebab dibalik ledakan tabung gas. “Yang jadi soal, masyarakat sering mengalami masalah, hambatan di selang. Harus pakai selang yang benar. Gas harus dengan komponen yang standar,” kata Darwin.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga menolak jika Pertamina yang disalahkan dalam kasus ledakan gas. Dia malah mengungkap tabung-tabung elpiji tiga kilogram yang beredar di masyarakat adalah tabung palsu. Itu akibat PT Pertamina sebagai produsen gas tidak mungkin menambah jumlah tabung yang beredar sesuai ketentuan yang digariskan pemerintah.

Bahkan, Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menduga ada pihak-pihak yang sengaja memproduksi tabung gas tanpa sepengetahuan pihak terkait. Dugaan itu didasarkan pada banyaknya perusahaan yang tiba-tiba memproduksi tabung gas dan membentuk asosiasi karena nilainya triliunan rupiah. Pertamina, kata dia, hanya membeli dari perusahaan yang direkomendasikan. Pertamina tak mungkin memproduksi tabung melebihi jumlah yang dibolehkan pemerintah karena hanya memproduksi untuk dibagikan secara gratis. “Jangan



Spesial Info

selalu Pertamina disalahkan terus, padahal bukan dia yang salah. Memang pengawasan harus betul-betul ditingkatkan,” ujar Said. (<http://vivanews.com>, 6/7/10)

Pernyataan dari masing-masing pihak tersebut tentu tidak menimbulkan dampak apa-apa bagi masyarakat sebagai korban. Tidak ada langkah konkret dari pihak yang seharusnya bertanggungjawab agar tidak terus merugikan masyarakat sebagai pihak yang memakai tabung tersebut atau sebagai pihak yang terkena dampak dari kebijakan yang dibuat pemerintah.

Persoalan ini juga mendapat perhatian dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Dalam Peraturan Pemerintah No. 59 tentang perlindungan konsumen barang dan jasa, masyarakat berhak mendapat perlindungan atas penggunaan tabung gas yang diberikan gratis oleh pemerintah.

Solusi yang dilakukan Pertamina selaku wakil dari suara pemerintah menyatakan bahwa Pertamina akan memfasilitasi tukar tambah terhadap komponen kompor gas seperti regulator, slang, dan katup tanpa SNI. Namun YLKI terus mendesak PT Pertamina agar tidak menjual selang dan regulator baru elpiji 3 kg, tetapi membagikan gratis kepada seluruh masyarakat yang ikut program konversi elpiji. Pengurus harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, sudah seharusnya PT Pertamina bertanggungjawab menarik produknya yang tidak layak dan menggantinya dengan yang baru. Tulus mencontohkan pihak swasta yang berani menarik kembali produknya jika ditemukan cacat atau tidak layak. (www.indonesiacompanynews.wordpress.com, 4/7/10).

Partisipasi Media

Berkaitan dengan sejumlah kasus di atas, dapat diajukan pertanyaan, seberapa besar peran dan partisipasinya terhadap kasus tersebut. Bila dicermati, media hanya berperan sebagai pemberi informasi karena seringkali hanya mengangkat fakta yang ada secara sporadis. Media hanya mengungkap beberapa fakta di tempat yang berbeda dengan kejadian hampir sama, namun tidak banyak memberikan solusi atau pencerahan kepada publik terhadap persoalan ini.

Tidak hanya itu, media juga hanya menyajikan berita dengan menonjolkan unsur sensasionalnya saja. Seperti kasus Ridho Januar (4,5 tahun), korban ledakan elpiji 3 kilogram berasal dari Jawa Timur. Pemberitaan tentang Ridho tampak menonjol unsur sensasinya, terutama dalam pemberitaan di televisi. Meski akhirnya, setelah pemberitaan tersebut Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih menjenguknya di RS. Cipto Mangunkusumo Jakarta, dan akhirnya bebas dari biaya selama perawatan luka bakarnya.

Namun, setelah kejadian itu apakah media turut mengawal nasib anak tersebut? Bagaimana dengan korban-korban ledakan lainnya, bahkan banyak yang meninggal dunia? Meskipun kemudian PT. Pertamina memberikan santunan terhadap semua korban dengan syarat-syarat yang ditentukan. Media tidak mengawal lagi persoalan ini.

Sesungguhnya media dapat berbuat lebih dari itu, jika jurnalis mampu berpikir kritis untuk melihat persoalan.

Melalui rangkaian fakta yang ada setidaknya dapat ditarik benang merah untuk memperjelas persoalan. Tapi sayang, media hanya sekadar merangkai fakta tanpa memberikan informasi lebih pada pembaca.

Padaحال media dibutuhkan untuk memberikan pencerahan pada publik di tengah “keruwetan” persoalan ini. Karena diketahui pihak-pihak yang diberi tanggungjawab tidak punya nyali untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Semua merasa sudah benar dan sesuai prosedur. Padahal masyarakat sebagai korban butuh informasi yang jelas tentang persoalan ini.

Paling tidak, ada “sesuatu” yang bisa didapat oleh masyarakat sebagai proses demokratisasi, fakanya memang ada kebenaran dan ada kesalahan. Jika terjadi kesalahan segera diperbaiki, agar hak-hak publik juga diketahui oleh publik itu sendiri. Capaian itu yang diharapkan oleh masyarakat, tidak ada pengabaian atas hak-hak warganya sebagai bentuk perwujudan demokrasi.

Kembali pada uraian di atas tentang banyak kasus ledakan elpiji, ada beberapa faktor yang diabaikan pemerintah. Faktor tersebutlah yang menimbulkan persoalan di lapangan. Berikut deskripsi persoalannya:

1. Minimnya sosialisasi

Faktor minimnya sosialisasi ini sebenarnya sudah disinggung oleh salah satu narasumber di atas. Mengapa persoalan sosialisasi ini menjadi penting? Karena ada persoalan mental bagi masyarakat kita karena kebiasaan yang begitu lama dalam penggunaan bahan bakar minyak tanah.

Pemahaman penggunaan teknologi ini menjadi penting mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan minyak tanah dan gas untuk kebutuhan rumah tangganya, terutama mereka yang berada di daerah pedesaan.

Peralihan dari bahan bakar kayu kemudian beralih ke minyak tanah dan selanjutnya ke gas inilah menjadi proses yang penting di mana terjadi peralihan perilaku. Jika dicermati mengubah perilaku yang sudah lama diterapkan di kehidupan mereka menjadi sangat tidak mudah. Oleh karena itu langkah sosialisasi juga tidak begitu saja dengan cepat.

Sosialisasi bisa dengan cara yang sederhana tapi terus diingat, seperti misalnya pengenalan mencium bau gas. Selanjutnya, pengenalan perangkat keras seperti mencermati kondisi tabung, regulator, selang, serta kompor yang dibagikan secara gratis oleh pemerintah. Hal ini jika dilakukan tentu butuh waktu untuk pemahaman perubahan teknologi tersebut.

Persoalan ini yang sepertinya dianggap sepele, namun dalam jangka panjang sesungguhnya sangat berperan dalam mengurangi dampak buruk terhadap kasus ledakan yang terjadi.

2. Ketersediaan barang

Pemerintah juga harus siap terhadap jaminan ketersediaan barang yakni gas khususnya gas 3 kilogram. Sejumlah media menyebutkan bahwa gas tiga kilogram langka di pasaran. Jika

Bersambung ke halaman...9



KEGIATAN IDEA JARAK (JARINGAN RAKYAT) BANTUL SIAP KELOLA PROGRAM KOLABORASI

JARINGAN Rakyat Bantul pada 7 Mei 2010 bertempat di kediaman Mbak Ana anggota Kelompok Pepadhang, Jambidan, Banguntapan menggelar pertemuan untuk mempersiapkan pengelolaan Program Kolaborasi LP3Y-IDEA-ASPPUK. Pertemuan selama dua jam tersebut dihadiri oleh perwakilan KTW Ngudi Mulyo Seloharjo Pundong, Kelompok Ngudi Waras Klisat, Pundong, Kelompok Tepat Maju Selopamioro Imogiri, Kelompok Tirto Mulyo Jatimulyo Dlingo, FKPP Wonolelo Pleret, dan Kelompok Pepadhang Jambidan, Banguntapan.

Dalam pertemuan tersebut dibahas capaian kelompok warga dalam Program Jaringan Ford Foundation (JFF) Bantul yakni terbentuknya lima kelompok warga sinau anggaran yakni Forum Komunikasi Kader Posyandu (FKKP) Wonolelo, Pepadhang Jambidan, Ngudi Waras Klisat, Cipto Manunggal Warungpring, dan Sitoresmi Gilangharjo. Tiap kelompok telah memiliki aturan main kelembagaan dan kas lembaga. Kelima kelompok selama proses JFF juga telah melakukan proses pembelajaran organisasi, pemetaan masalah lingkungan, training sinau anggaran, pembelajaran dialog publik, dan penyusunan rencana strategis kelompok.

Selain diskusi capaian kelompok, pertemuan yang juga difasilitasi IDEA ini juga mendiskusikan rencana aktivitas-aktivitas program kolaborasi yang disampaikan oleh IDEA. Setidaknya terdapat 15 jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh lima kelompok yang menjadi mitra IDEA dalam Program Kolaborasi LP3Y-IDEA-ASPPUK. Yang menarik dalam pertemuan ini adalah adanya usulan tentang keterlibatan kelompok yang tidak termasuk dalam lokasi program kolaborasi untuk dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan program kolaborasi. Alasan yang mengemuka untuk usulan tersebut adalah supaya kesempatan pembelajaran juga didapat oleh kelompok di luar lokasi program kolaborasi. Usulan tersebut kemudian disepakati untuk diakomodir dengan teknis yang diserahkan kepada IDEA.

Sebagai bagian dari strategi pengelolaan program kolaborasi, selanjutnya IDEA mengusulkan kepada JARAK Bantul untuk membentuk tim kecil yang menjadi mitra manajemen program kolaborasi. Atas kesepakatan bersama terbentuklah tim kecil JARAK yang beranggotakan Ulil (FKKP), Ana (Pepadhang), Wakiman (Tepat Maju), Nurul Huda (Tirto Mulyo), dan Ngadilan (Ngudi Waras). Teknis koordinasi detail akan didiskusikan oleh tim kecil JARAK bersama IDEA dalam kesempatan yang disepakati.

Tim Kecil JARAK BANTUL Cermati Aktivitas Program Kolaborasi

Sebagai tindak lanjut pertemuan JARAK BANTUL yang dilakukan pada tanggal 7 Mei 2010 maka diselenggarakanlah pertemuan Tim Kecil JARAK BANTUL untuk pertama kali. Pertemuan ini dilakukan di Resto Parangtritis pada 14 Mei 2010. Dalam pertemuan yang dihadiri seluruh anggota tim kecil tersebut didiskusikan detail aktivitas yang akan dilakukan sepanjang dua tahun Program Kolaborasi LP3Y-IDEA-ASPPUK. Terdapat 15 jenis kegiatan yang dilakukan baik di tingkat desa, di lima desa mitra maupun aktivitas di tingkat kabupaten.

Dalam pertemuan tim kecil ini disepakati pembagian peran tiap anggota dalam tiap proses kegiatan dan langkah-langkah koordinasi antara tim kecil dan kelompok mitra di masing-masing desa. Meski masih membutuhkan pendalaman, namun hal ini menumbuhkan rasa kebersamaan antara organisasi komunitas dan pengurus di tingkat jaringan kabupaten. Model relasi koordinasi yang lebih operasional ini merupakan hal yang baru bagi JARAK BANTUL dan kelompok-kelompok warga di lima desa mitra.

Tim Kecil JARAK BANTUL juga bersepakat untuk membangun koordinasi yang lebih intensif dalam pengelolaan program Kolaborasi ini dengan pertemuan 2 (dua) mingguan yang digunakan untuk *update* kabar sekaligus melakukan pembangunan sistem pelaporan kerja dan administrasi.

Bendahara JARAK Bantul dan SRAWUnG Gunungkidul ikuti Training Singkat Keuangan

Sebagai upaya memperkuat jaringan organisasi komunitas dari sisi transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan lembaga, bendahara JARAK dan SRAWUnG dibekali keterampilan penyusunan laporan keuangan kelembagaan. Kegiatan yang dikemas dalam training keuangan ini diselenggarakan di kantor IDEA Yogyakarta pada 11 Juni 2010 yang dihadiri oleh dua orang bendahara dari JARAK dan dua orang bendahara dari SRAWUnG. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pegiat komunitas yang menempati posisi keuangan supaya dapat menyajikan laporan keuangan rutin sesuai prinsip transparansi dan akuntabel.

Kegiatan yang dilakukan bersama antara JARAK dan SRAWUnG juga dimaksudkan untuk menumbuhkan solidaritas dalam pembelajaran bersama antara jaringan komunitas di tingkat kabupaten yakni antara JARAK di Kabupaten Bantul dan SRAWUnG di Kabupaten Gunungkidul. (*tim idea*)



KEGIATAN ASPPUK

Workshop Perencanaan program ASPPUK:

Pelaksanaan

Kegiatan Workshop perencanaan akan dilakukan di Dusun Meijing, Desa Mulyodadi, Bantul pada:

Desa	Hari/tanggal	Waktu	Tempat
Mulyodadi	Sabtu-Minggu, 19-20 juni'10	09.00-16.00	Dusun Meijing
Wonolelo	Senin-Rabu, 22-24 Juni'10	12.00-16.30	Niki Mawon
Gilangharjo	Minggu-Senin, 27-28 Juni'10	09.00-16.00	Balai desa
Jambidan	Selasa-Rabu, 29 juni-1 Juli'10	12.00- 16.30	Balai desa

Jadwal tentative

Waktu	Hari 1	Hari 2
09.00-10.00	Pembukaan, membangun suasana dan kesepakatan waktu	PWR
10.00- 12.00	Mapping	Lanjutan & daur hidup perempuan
12.00-13.00	Istirahat	Istirahat
13.00-15.00	Diagram ven	SWOT analisis
15.00-16.00	Analisis	Perencanaan

Tujuan

Tujuan penyelenggaraan workshop perencanaan adalah:

1. Memetakan persoalan-persoalan terkait dengan perempuan dan kemiskinan dilingkungan desa.
2. Meningkatkan motivasi peserta untuk merubah kondisi yang telah dipetakan tersebut
3. Menganalisis SWOT
4. Merumuskan perencanaan selama 2 tahun terkait dengan persoalan-persoalan kemiskinan dan perempuan.

Alur

Kegiatan workshop perencanaan akan diawali dengan pemetaan persoalan dengan beberapa metode PRA (mapping, diagram ven, PWR) dan daur hidup perempuan. Setelah itu dilakukan analisis SWOT sebelum masuk ke perencanaan. Kemudian dilanjutkan dengan merumuskan perencanaan selama 2 tahun.

Fasilitator

Pelaksanaan kegiatan workshop akan difasilitasi oleh tim ASPPUK. (*tim asppuk*)

sambungan dari halaman...7

ada di pasaran, harganya pun sangat tinggi. Beberapa wilayah, salah satu contoh misalnya di wilayah Klaten, Jawa Tengah, harga elpiji tersebut mencapai Rp. 18.000 per tabung. Padahal sebelum rayonisasi dan sistem kuota yang diberlakukan 1 juni 2010 ini, harga eceran tertinggi elpiji 3 kilogram hanya mencapai Rp. 13.500 per tabung. (*Media Indonesia*, 18/6/10)

Persoalan inilah yang seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah untuk menyediakan barang. Padahal sekian lama masyarakat menggunakan bahan bakar minyak tanah, kejadian hilangnya minyak tanah atau antrian minyak tanah baru terjadi beberapa tahun belakangan ini terutama dalam program pengalihan ini.

3. Perangkat keras berkualitas

Perangkat keras yang meliputi tabung gas, selang dan regulator serta kompor harus berkualitas dan aman bagi

masyarakat. Setelah terjadi sejumlah kasus ledakan akhirnya Pertamina membuat pernyataan bahwa beberapa perangkat tersebut harus berlabel SNI agar berstandar.

Pertanyaannya, apakah program konversi ini tidak memedulikan kualitas perangkat tersebut karena dibagikan gratis? Inilah yang menimbulkan tanda tanya di masyarakat sehingga ada banyak orang beranggapan “karena barang gratis, sehingga yang dibagikan juga di bawah standar”. Apa demikian?

Di mana tanggungjawab negara untuk memenuhi unsur yang membuat rasa aman bagi masyarakatnya? Bukan malah menjadi beban masyarakat yang seharusnya nyaman menggunakan produk yang memang wajib digunakan. Semoga, langkah pemerintah tidak lamban, karena jika terus seperti ini berita ledakan gas elpiji akan terus menghantui masyarakat Indonesia. (**ismay prihastuti**)



Sumber Info



KETIKA JURNALIS TELEVISI MENCATAT DIRI SENDIRI

TIDAK salah, memang, mengisahkan diri sendiri kemudian dirangkum menjadi sebuah buku. Apalagi, dalam pengkisahan itu dibumbui pula dengan berbagai pengalaman menarik, menyangkut apa saja yang sudah dilakukan, sudah terjadi, dan *tetek bengkek* persoalan dan beragam solusinya, terutama berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan sang penulis.

Demikian kurang lebih jika buku ini disimak. Sebab, mulai dari halaman pertama hingga terakhir, sarat berisi pengkisahan pengalaman diri menjalani profesi sebagai jurnalis televisi atau semacam catatan pribadi yang disusun sistematis. Meski, –ini perlu dicatat tersendiri– hampir pada tiap bab atau tiap bagian tulisan, selalu dibubuhi foto diri sang penulis dalam berbagai aksi di berbagai lokasi. Mulai halaman pertama, pembaca sudah disugahi gambar sketsa diri sang penulis dan foto saat penulis berada di Cina (hal 3) lengkap dengan *caption*nya.

Tentu saja, yang perlu dicatat dalam buku semacam ini, adalah, pengkisahan itu bisa lebih cermat agar tidak terjerembab menjadi cerita narsistik yang cenderung memuji diri sendiri. Atau tidak pula, demi menutupi kesan narsis itu, dibelok-belokkan atau ditambah-tambahi dengan berbagai teori yang bisa melahirkan kesan bahwa penulis sedang menggurui para pembaca.

Sejak awal, dalam pengantar buku ini, penulis memang sudah meniatkan membuat buku dengan pilihan gaya seperti itu. Pilihan penggunaan “saya” dalam penuturan dalam buku ini, disadari oleh penulis menjadi untaian cerita gado-gado. Mengapa harus menggunakan kendaraan “saya”? Karena, menurut sang penulis buku ini, dirinya membutuhkan *human example* yang paling murah dan dijangkau pikiran untuk memuluskan penceritaan. (hal vii). Adapun bab per-bab dalam buku, dituturkan sebagaimana *rundown* sebuah program berita menjadi segmen per-segmen.

Maka meluncurlah segmen pertama yang dibuka tentang perjalanan hidup yang berkaitan dengan profesi jurnalis televisi. Bagian kedua dan ketiga persiapan menekuni profesi jurnalis televisi dan aspek-aspek di dalam lingkungan televisi.

Dalam bagian ketiga dikisahkan tentang apa dan bagaimana penggarapan berita televisi di *newsroom*. Sedangkan pada segmen terakhir, dipaparkan tentang sisi jurnalis televisi yang diistilahkan oleh penulis buku ini sebagai *back to the jungle* alias balik kanan ke kantor. Bagian ini mengupas teori ideal dan praktik pekerjaan sebagai produser dan perkembangan tren jurnalistik televisi terbaru.



Judul Buku	: Gado-gado Sang Jurnalis Rundown Wartawan Ecek-ecek
Penulis	: Syaiful Halim
Penerbit	: Gramata Publishing
Tahun	: 2009
Tebal	: xiv + 338

Minat jadi profesi

Pada segmen pertama, penulis membawa kisahny sendiri ke masa lalu yang disajikan kepada pembaca untuk dimengerti, dipahami. Antara lain, bagaimana serial *The Andros Target* di TVRI pada tahun 70-an begitu mempengaruhi dan berikan kesan mendalam pada diri penulis. Lewat sosok sang tokoh dalam serial itu, wartawan bernama Mike Andros, diam-diam penulis

mencita-citakan dirinya bisa seperti seorang wartawan investigasi itu. Waktu pun berjalan. Kisah pun terus meluncur. Mulai dari kuliah di juru-san ilmu komunikasi, kemudian “nyambi” menjadi jurnalis media cetak dan akhirnya menekuni profesi sebagai jurnalis televisi. Itulah keniscayaan pada diri penulis buku ini. Pengalaman selama perjalanan menempuh kehidupan itulah, yang menjadi dasar atau inti cerita dalam buku ini. Bahwa di sana juga dicantumkan bagaimana filosofi dasar serta filsafat komunikasi, misalnya, atau ada pula diktum 5W+H, merupakan bumbu lain sebagai penyedap yang tentu saja porsinya terasa lebih sedikit dibanding pengkisahan pribadi si jurnalis.

Selain itu, penggunaan bahasa dalam buku ini boleh dikatakan, belum seluruhnya memakai kaidah standar Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak istilah bahasa tutur, bahasa lisan di sana. Pemakaian bahasa “aneh” untuk menggambarkan orang tertawa: wakakakakak (hal 7, 11, 30 dan masih terdapat di berbagai halaman) justru mengganggu. Bukankah pembaca dipaksa membaca sebuah buku dan bukan sedang berinteraksi di fasilitas jejaring sosial internet, semacam facebook? (awd)

RAKOM DAN CITA-CITA PNS MARJUDIN

INILAH Marjudin. Pria bujangan berumur 25 tahun, yang merasa belum punya “jam terbang” memadai di dunia jurnalistik itu, bertekad untuk terus berjuang menggeluti jurnalistik. Tak hanya di dunia tulis menulis, tapi juga penyiaran.

Marjudin, pendiri Radio Komunitas (Rakom) “Sadewa”, di Desa Wonolelo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, memang sudah meniatkan diri mengalirkan nafas hidupnya berkubang dalam bidang komunikasi.

Kini, selain bergiat di Rakom Sadewo, Judin –demikian ia akrab disapa- terus melangkah. Bersiaran di Rakom Sadewo dan menulis, misalnya, hampir tak pernah absen dilakukan sebagai kegiatan sehari-hari. Pekerjaan yang dilakoninya saat ini antara lain menjadi editor berita Rakom yang kemudian ditempatkan di situs Suara Komunitas.net. Selain itu, Judin juga aktif menulis artikel opini, terutama dengan isu pendidikan, di Majalah *Chandra*, milik Dinas Pendidikan.

Semua itu bermula dari tahun 2007. Saat itu Judin menjadi salah satu peserta mewakili Desa Wonolelo yang mengikuti program pelatihan jurnalistik di LP3Y. Setelah itu, dia melesat dengan beragam aktivitas, yang tentu saja berkaitan dengan jurnalistik.

Memang tidaklah berkebetulan jika dia kemudian mengikuti pelatihan jurnalistik. Sebab, ketertarikannya di bidang ini sudah menyembul sejak duduk di bangku SMA. Dia mengikuti berbagai kegiatan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) kala itu. Kemudian berbekal ilmu dari LP3Y itulah Judin mengelola majalah dinding di desanya. “Ilmu formal saya di bidang jurnalistik, ya, saya dapat dari LP3Y,” ujar pria bertinggi badan 160 Cm dan berat 45 kilogram ini. Tentu Judin boleh berbangga, sebab majalah dinding Desa Wonolelo yang dia garap bersama beberapa teman sedesanya, meraih prestasi menjadi juara pertama pada lomba tahun 2007, mengalahkan empat desa lain dalam kompetisi yang diadakan LP3Y.

Bagi lulusan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta tahun 2009 itu, mendirikan radio komunitas adalah cita-cita yang mesti terwujud. Maka, dengan penuh ketekunan dan kerja keras, meski tanpa fasilitas, Judin dan



foto: mawati LP3Y

beberapa kawannya terus berusaha demi mewujudkan rakom dambaannya. Maka, pada tahun 2008 secara resmi Rakom Sadewo berdiri. “Ini juga atas *support* dari LP3Y *kok*,” ujar Judin yang kini berhak mencantumkan gelar Sarjana Pendidikan Islam, atau disingkat SPd.I, di belakang namanya. Kini setiap hari di Desa Wonolelo mengudara Rakom Sadewo sebagai sarana komunikasi dan informasi antarwarga. Banyak hal sudah didapat dengan adanya radio komunitas itu. Daya kritis yang terbangun di tengah warga desa setempat, adalah satu keniscayaan. Hal lain, tentu, sebagai sarana hiburan. Tidak bisa dimungkiri, memang, media komunikasi audio itu, kini telah mendekatkan warga satu sama lain, paling tidak secara emosional. Apalagi, semangat rakom adalah dari warga, oleh warga untuk warga.

Pengalaman mengelola rakom, lengkap dengan suka-dukannya itulah yang kini menjadikan Judin tak pernah putus asa jika menghadapi hambatan. Pada awal berdiri, Rakom Sadewo memang sarat dengan kisah “duka”. “Ketika alat rusak dan tidak ada dana, maka kami harus putar otak. Bahkan tak jarang mesti tombok. Padahal itu berat sekali. Tapi, siaran *kan* tidak boleh berhenti. Ya, kami berusaha keras,” ujarnya ketika ditemui di Desa Pleret, Bantul, akhir Juni lalu. Saat itu Judin sedang mengadakan pertemuan dengan beberapa orang dari lima desa di Bantul, peserta program Warga Bermedia yang diselenggarakan LP3Y dan Ford Foundation.

Tak ada lagi hari tanpa siaran Rakom Sadewo di Desa Wonolelo sekarang. Beberapa program unggulan sudah pula dimiliki. Misalnya program musik dangdut di pagi hari, campursari di siang hari atau musik pop dan program religi. Tentu saja disiarkan pula program berita.

Namun, bagi anak kelima dari pasangan Hadi Sumarto (51) dan Mariyem (50), ini, masih ada obsesi lain yang terus mengingang dalam benaknya. “Saya bercita-cita ingin jadi pegawai negeri sipil (PNS). Jadi guru pendidilan agama Islam.”

Demikianlah, di tengah aktivitasnya bersiaran radio komunitas dan menulis, cita-cita PNS itu pun terus membubung di udara menjadi asa. (awd)